

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

PERUBAHAN

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2024

KECAMATAN TULANGAN

bangga
melayani
bangsa



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN TULANGAN

Jl. Raya Kenongo No. 20 Tulangan 61273

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah S.W.T, karena atas berkat rahmat serta karunia-Nya sehingga Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo dapat menyusun dan menyelesaikan Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2024.

Dalam Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tulangan yang berisi rencana dan tindakan strategis yang memuat program maupun kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Tulangan dalam Tahun Anggaran 2024. Rencana Kerja merupakan penjabaran operasional dari dokumen Rencana Strategis yang telah ditetapkan melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Secara khusus, Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran kedepan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi dari masyarakat, karena rencana kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah menjadi perangkat penting dalam menjelaskan serangkaian tindakan yang bersifat operasional dan dilakukan dalam jangka pendek untuk mencapai tujuan dan arah kebijakan yang sudah ditetapkan dalam rencana strategis perencanaan pembangunan daerah.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tulangan Tahun Anggaran 2024 dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja. Keputusan Camat Tulangan tentang Rencana Strategis tahun 2021 – 2026 dan bersifat indikatif. Selanjutnya Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah menjadi landasan atau pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun anggaran 2024.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tulangan diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan sehingga program dan kegiatan Kecamatan Tulangan dapat terlaksana dengan optimal, tak

lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya rencana kerja ini. Perlu disadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan rencana kerja ini, oleh karena itu masukan serta saran yang membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan dimasa mendatang.

Atas masukan serta saran yang positif dan membangun disampaikan terima kasih.

Tulangan, 8 Januari 2024

CAMAT TULANGAN



SUPRAYITNO, S.STP., M.HP

Pembina Tingkat I

NIP. 197901011998101001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja	6
BAB 2	7
EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU.....	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	10
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	11
2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD	1
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	1
BAB III.....	1
TUJUAN, SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN.....	1
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	1
3.2. Tujuan dan Sasaran Kerja SKPD	1
3.3. Program dan Kegiatan	2
BAB IV.....	1
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	1
BAB V.....	1
Penutup.....	1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah yang terdiri dari setiap SKPD yang merupakan penjabaran dari rencana kerja pemerintah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Adapun dokumen awal dalam rencana kerja yang dipersiapkan adalah adanya rancangan awal dari RKPD, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang *“Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ”*. Bahkan telah ditetapkan pula di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh serta harus tanggap terhadap adanya perubahan-perubahan dalam jenjang perencanaan.

Pada tahun anggaran 2024 dimaksud diharapkan semua target yang telah ditetapkan dalam SKPD yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Sidoarjo diharapkan dapat tercapai. Dalam agenda pembangunan yang telah dicanangkan dalam tahun 2021-2026 Kecamatan Tulangan sasaran serta target kinerja yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan.
- 2) Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan pembinaan pemerintahan desa.

Hal tersebut merupakan pilihan yang telah menjadi komitmen bersama sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah daerah , DPRD, kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak dibidang sosial budaya, ekonomi, politik dan keamanan, untuk mencapai hal tersebut proses pembangunan

daerah dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan hasil-hasilnya. Dari pemikiran di atas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan adalah merupakan instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Dengan kata lain perencanaan pembangunan yang baik akan dapat menghasilkan pembangunan yang baik yang dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tulangan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi dan Misi Indonesia Masa Depan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286).
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembarab Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4614).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664).
13. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815).
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816).

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan telah diubah lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang “Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah”.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
24. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025.
25. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024.

26. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 – 2025.
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo.
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo
29. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
30. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo;
31. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2009 tentang Kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat;
32. Surat Edaran Bupati Sidoarjo, Nomor 050/2320/438.6.1/2022 tentang Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.
33. Surat Edaran Bupati Sidoarjo, Nomor 050/1310/438.6.1/2023 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dalam Penetapan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Tulangan tahun anggaran 2024 adalah untuk memberikan panduan dan dasar serta sebagai pedoman atau arahan dalam pelaksanaan kegiatan dalam mencapai keadaan yang diinginkan untuk kurun waktu selama 1 (satu) tahun anggaran kedepan sesuai dengan tujuan sasaran pembangunan yang sudah dirumuskan dalam Renstra Kecamatan Tulangan 2021–2026.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana kerja adalah sebagai parameter dalam pengukuran capaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah khususnya pada Kecamatan Tulangan antara lain :

- Mewujudkan tujuan , strategi dan kebijakan Kecamatan Tulangan
- Memberikan kondisi penciptaan integrasi , sinkronisasi dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan

pembangunan di wilayah Kabupaten Sidoarjo khususnya Kecamatan Tulangan

- Dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan
- Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

1.4. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang “Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ” maka Sistematika Penulisan Rencana Kerja Kecamatan Tulangan Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan.
- 1.3. Maksud dan Tujuan.
- 1.4. Sistimatika Penyusunan Rencana Kerja.

BAB II : Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD .
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.
- 2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan.

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD.
- 3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V : Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Kecamatan Tulangan, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan, dimana tahun anggaran 2022 Kecamatan Tulangan melaksanakan 5 Program dan 13 Kegiatan serta 33 Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 6.290.506.732,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 5.846.296.232,00 atau 92,94% dengan rincian sebagai berikut Tabel 2.1:

Tabel 2. 1 Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		5.497.830.404,00	5.216.973.982,00	94,89
	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	1.628.000,00	1.628.000,00	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.340.200,00	990.000,00	42,30
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.765.346.680,00	3.579.795.749,00	95,07
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.691.900,00	11.420.765,00	97,68
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64.919.835,00	63.778.255,00	98,24
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.214.200,00	3.209.454,00	99,85
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	95.000.000,00	79.300.000,00	83,47
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.083.500,00	2.056.000,00	98,68

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.740.000,00	3.960.000,00	83,54
	Penyediaan Bahan/Material	10.220.529,00	10.056.400,00	98,39
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	84.164.000,00	83.784.000,00	99,55
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	141.108.680,00	128.626.000,00	91,15
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	110.480.280,00	110.064.300,00	99,62
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.000.000,00	24.075.000,00	99,18
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	212.200.000,00	165.653.851,00	99,18
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	856.960.000,00	853.824.408,00	99,18
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.366.300,00	17.039.750,00	99,18
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31.366.300,00	28.120.650,00	99,18
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	49.591.400,00	99,18
	Jumlah	5.497.830.404,00	5.216.973.982,00	94,89
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		670.587.500,00	507.781.750,00	75,72
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	532.637.500,00	370.387.500,00	69,54
	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	4.675.000,00	4.675.000,00	100,00

	Wilayah Kecamatan			
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	12.080.000,00	12.080.000,00	100,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	121.195.000,00	120.639.250,00	99,54
	Jumlah	670.587.500,00	507.781.750,00	75,72
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		50.827.500,00	50.827.500,00	100,00
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	11.850.000,00	11.850.000,00	92,57
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	24.790.000,00	24.790.000,00	100,00
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	14.187.500,00	14.187.500,00	99,17
	Jumlah	50.827.500,00	50.827.500,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		47.811.328,00	47.263.000,00	98,85
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan	47.811.328,00	47.263.000,00	98,85

	Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
	Jumlah	47.811.328,00	47.263.000,00	98,85
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		23.450.000,00	23.450.000,00	100,00
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9.725.000,00	9.725.000,00	100,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	13.725.000,00	13.725.000,00	100,00
	Jumlah	23.450.000,00	23.450.000,00	100,00
Surplus/Defisit		(6.290.506.732,00)	(5.846.296.232,00)	92,94

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Tulangan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Kecamatan Tulangan dalam pelaksanaan pelayanan pada masyarakat sudah sesuai dengan Keputusan Camat Tulangan Nomor: 188/56/404.8.13/2020 tentang Standart Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan pada Kantor Kecamatan Tulangan yang terdiri dari:

- Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Penerbitan Kartu Keluarga (KK);Penerbitan Surat Pengantar Pindah keluar dan pindah datang;
- Penerbitan Surat Keterangan Pencari Kerja;
- Penerbitan Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- Pengesahan / legalisir Surat Kependudukan (Leges)
- Penerbitan Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);

- g. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tinggal Non Tingkat Non Perumahan dengan luas dibawah 400 M2;
- h. Pengesahan Surat Keterangan Waris;
- i. Penerbitan surat perubahan hak atas tanah;
- j. Pelayanan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) usaha mikro;
- k. Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) usaha mikro.

Dimana semua jenis pelayanan tersebut sudah dijelaskan baik syarat-syarat, besarnya biaya, lama waktu penyelesaian dan spesifikasi produk.

Dalam melaksanakan pelayanan administrasi, Kecamatan Tulangan telah menetapkan Standart Pelayanan dengan Aplikasi “Cepet Muli” dengan menetapkan ketentuan dan persyaratan – persyaratan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh masyarakat sebagai pemohon maupun oleh petugas pelayanan administrasi di Kecamatan Tulangan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Kecamatan Tulangan

Dalam rangka pelayanan kinerja Kecamatan Tulangan memberdayakan SDM yang sudah memadai dari segi kuantitas namun masih kurang dari segi kualitas, adapun komposisi karyawan Kecamatan Tulangan :

1. Camat
2. Sekretaris Camat
Dibawah Sekretaris ada 2 (dua) Sub Bagian terdiri dari :
 - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Kepala Seksi Pemerintahan
4. Kepala Seksi Perekonomian
5. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
6. Kepala Seksi Trantib
7. Kepala Seksi Pembangunan
8. Staf Kecamatan 27 orang

Dari Sumber Daya Manusia tersebut telah memadai untuk memberikan pelayanan prima pada masyarakat, disamping itu pelayanan kinerja Kecamatan Tulangan semakin meningkat.

Dengan demikian kinerja pelayanan Kecamatan Tulangan cukup melayani kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan memenuhi Standart Operasional Prosedur (SOP) sehingga kinerja pelayanan dapat terlaksanan dengan baik sebagaimana tuntutan masyarakat.

2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Tulangan

Permasalahan Kecamatan Tulangan dalam melaksanakan tupoksinya adalah sebagai berikut :

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan
- b. Terbatasnya Anggaran untuk mendukung kegiatan sesuai kewenangan SKPD
- c. Etos Kerja yang terbina secara optimal

2.3.3. Dampak terhadap Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah

Pemerintah Kecamatan merupakan bagian internal dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, oleh karena itu sistem perencanaan program kegiatan Kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari program kegiatan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

Penyerahan urusan di berbagai bidang kepada Pemerintah Daerah dilandaskan pada peraturan perundang-undangan tidak terkecuali dalam hal regulasi kelembagaan pemerintah daerah yang berkaitan langsung dengan kelembagaan Pemerintah Daerah yaitu PP 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan PP Nomor 19 Tahun 2007 tentang Kecamatan, yang implementasinya diapresiasi melalui Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2008.

Berkaitan dengan hal tersebut , Bupati melimpahkan sebagian kewenangan kepada Camat sebagai perangkat daerah untuk menyelenggarakan bidang pemerintahan, bidang pembangunan dan bidang kemasyarakatan di wilayah Kecamatan.

Sebagaimana diketahui **Visi Kabupaten Sidoarjo :**

“TERWUJUDNYA KABUPATEN SIDOARJO YANG SEJAHTERA, MAJU, BERKARAKTER DAN BERKELANJUTAN”

Ini menjadi dasar penyusunan rencana strategis (jangka menengah) Kecamatan pada umumnya termasuk Kecamatan Tulangan

Misi Kabupaten Sidoarjo :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan public dan kemudahan berusaha;

2. Membangkitkan pertumbuhan ekonomi dengan focus pada kemandirian local berbasis UMKM, koperasi, pertanian, perikanan, sector jasa, dan industry untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan;
3. Membangun infrastruktur ekonomi dan social yang modern dan berkeadilan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan;
4. Membangun SDM unggul dan berkarakter melalui peningkatan akses pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan dasar lainnya;
5. Mewujudkan masyarakat religious yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan, serta mampu menjaga kerukunan social antar warga.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dari misi yang ditetapkan adalah :

- a. Meningkatkan Tata Kelola dan Pelayanan Publik Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo yang Baik.;
- b. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik;
- c. Meningkatkan kapasitas Fiskal daerah;
- d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif;
- e. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Sidoarjo;
- f. Meningkatkan jumlah lapangan kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran;
- g. Peningkatan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidoarjo;
- h. Meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat dan pemberdayaan perempuan;
- i. Mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata.;
- j. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata;
- k. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib dan tenteram;
- l. Meningkatkan peran budaya lokal dan pemuda dalam pembangunan;
- m. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Publik yang Memacu dan Memicu Kegiatan Perekonomian;
- n. Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup yang baik bagi masyarakat.

Sasaran yang ingin dicapai adalah :

- a. Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kabupaten Sidoarjo yang baik.;
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang inovatif dan merata.;
- c. Terwujudnya tatakelola pemerintahan desa yang baik.;
- d. Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah Berbasis pada sumber-sumber penerimaan daerah yang fundamental;
- e. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif.
- f. Meningkatnya kontribusi sektor potensial;
- g. Meningkatnya kontribusi sektor prime;
- h. Berkembangnya sektor pariwisata yang terintegrasi dengan sektor kreatif ;
- i. Meningkatnya Iklim Investasi yang Kondusif di Kabupaten Sidoarjo.;
- j. Meningkatnya Jumlah Lapangan Kerja dan Berkurangnya Tingkat Pengangguran;
- k. Meningkatnya ketersediaan dan mutu pangan daerah;
- l. Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM dan Koperasi.
- m. Meningkatnya peran perempuan dalam perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan keluarga, dst.

Program Prioritas Kabupaten Sidoarjo :

1. 100.000 Lapangan Kerja Baru
2. BPJS Kesehatan Gratis Seluruh Warga
3. Gratis Makanan Tiap Hari Warga Miskin
4. 10.000 Beasiswa Kuliah
5. Insentif Plus Guru Ngaji dan Guru Agama
6. Rp. 5 Juta – 50 Juta Modal Usaha Mikro Perempuan
7. Rp. 6 Juta Operasional RT Per Tahun
8. 20.000 UMKM Naik Kelas
9. Penataan Kota dan Transportasi Terpadu Urai Kemacetan
10. Tingkatkan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan dan Kader Posyandu
11. Tingkatkan Kesejahteraan GTT, Guru Swasta dan Tenaga Honorer
12. Youth Center, Bangun Pusat Kreativitas Anak Muda
13. 2.000 Warung Rakyat di Renovasi
14. Tingkatkan ADD untuk Desa Sejahtera
15. 24 Jam Pengaduan Rakyat Respons Cepat
16. Reformasi Perizinan untuk Bisnis Kondusif

17. Perluas RTH, Revitalisasi Sungai, Revolusi Manajemen Sampah

TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN RANCANGAN RKPD KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2024

a. TEMA

“Penguatan Konektivitas Kawasan Strategis sebagai Pendorong Tumbuhnya Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Berdampak pada Pengentasan Kemiskinan”

b. PRIORITAS PEMBANGUNAN

- 1) Penataan Kota, Sistem Terpadu Pengurai Kemacetan, dan Pemenuhan Infrastruktur Pendorong Konektivitas Antar Wilayah
- 2) Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Perumahan dan Permukiman, Penanganan Sampah Terpadu, serta Sarpras Utilitas Lainnya yang Berwawasan Lingkungan
- 3) Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar, Ketahanan Pangan, dan Energi Berkelanjutan
- 4) Revitalisasi Nilai Budaya Lokal sebagai Spirit Pendukung Pembangunan Daerah
- 5) Mendorong Berkembangnya Sektor Strategi Industri, Perdagangan, Jasa, dan Mendorong Berkembangnya Usaha Mikro, Koperasi, Industri Kreatif, Pariwisata yang Berorientasi Pengentasan Kemiskinan serta Pengangguran
- 6) Penguatan Daya Saing SDM yang Berkarakter
- 7) Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menciptakan Suasana yang Setara, Toleran, Tertib, dan Nyaman.

2.3.4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Tulangan

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat diberbagai sektor serta pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang tentunya akan berakibat meningkatkan kebutuhan pelayanan masyarakat yang harus dilayani oleh Pemerintah.

Menyikapi dokumen RT/RW Pemerintah Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo yang telah mengamanatkan bahwa wilayah Pemerintah Kecamatan Tulangan akan dijadikan Kota Mandiri (Kota Baru Tulangan) . Kondisi ini dapat kita lihat

langsung bahwa pertumbuhan kawasan permukiman (Real Estate) dan Properti lainnya sangat tinggi sekali dan dampak yang dapat dirasakan secara langsung adalah meningkatnya jumlah penduduk Kecamatan Tulangan.

Dengan bertambahnya jumlah penduduk juga akan berdampak pada pelayanan di bidang pekerjaan umum dan perhubungan yaitu meningkatnya kerusakan sarana dan prasarana jalan serta kemacetan dan kecelakaan lalu-lintas.

Berikut adalah analisa tantangan dan peluang baik dari internal maupun eksternal Kantor Kecamatan Tulangan :

Tabel 2. 2 Peluang dan ancaman yang ada di Kecamatan Tulangan

	Peluang	Tantangan
Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan Tupoksi Kecamatan • Tersedianya jumlah personalia yang memadai • Tersedianya anggaran yang memadai untuk mendukung operasional SKPD • Tersedianya bangunan Kantor Kecamatan sebagai pusat penyelenggaraan pemerintahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum meratanya distribusi personalia menurut kualitas dan kapabilitasnya • Sarana dan prasarana yang membutuhkan pemeliharaan
eksternal	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terhadap Aplikasi Si Praja dan Plavon • Tersedianya potensi perekonomian masyarakat untuk dikembangkan • Adanya pembangunan perekonomian daerah/nasional yang berkesinambungan • Adanya kondisi sosial dan budaya masyarakat yang harmonis dan toleran diantara keberagaman • Adanya pembangunan yang selaras dan serasi antar wilayah • Masih terbukanya peluang pangsa pasar untuk produk lokal 	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Daya Manusia yang berlatar belakang IT masih Minim • Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan perekonomian masyarakat • Terdapatnya disparitas perkembangan masyarakat sebagai akibat perbedaan budaya/kebiasaan • Munculnya semangat egosentrisme membangun wilayah • Secara Geografis, wilayah Kecamatan Tulangan berdekatan dengan kota Surabaya, menyebabkan mobilitas manusia bisa cukup tinggi sebagai cikal bakal adanya masalah

		kesejahteraan sosial, konflik sosial, dan ancaman terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah kecamatan Tulangan.
--	--	---

2.3.5. Isu-Issu Strategis Kecamatan Tulangan

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi atau cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program oleh SKPD yang bersangkutan, guna mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran Kantor Kecamatan Tulangan strategi yang ditempuh adalah :

1. Peningkatan kompetensi dan kualifikasi pegawai. Seiring meningkatnya dinamika tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk meningkatkan kompetensi pegawai kecamatan Tulangan.
2. Peningkatan sarana prasarana kecamatan. Sarana prasarana kecamatan ini sangat penting karena berkaitan dengan pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Jika sarana prasarana kurang memadai maka pelayanan kepada masyarakat akan kurang optimal
3. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dilaksanakan dengan transparansi dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
4. Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
5. Meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan sektor swasta.

Kebijakan merupakan arah yang diambil oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut targetnya kebijakan terdiri atas :

1. Kebijakan Internal, yaitu kebijakan SKPD dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan. Kebijakan internal yang diambil oleh Kecamatan Tulangan adalah :
 - a. Menyelenggarakan administrasi perkantoran dan keuangan pegawai;
 - b. Mewujudkan suasana kerja/lingkungan kerja yang kondusif;
 - c. Menyusun program kerja pemerintah secara koordinatif;
 - d. Mengadakan administrasi desa;
 - e. Melaksanakan dan melaporkan administrasi pemerintahan desa;
 - f. Menyelenggarakan pelayanan prima
2. Kebijakan Eksternal yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh SKPD dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Kebijakan eksternal Kecamatan Tulangan adalah :
 - a. Mendorong pemberdayaan masyarakat;
 - b. Meningkatkan intensifikasi penagihan PBB kepada masyarakat;
 - c. Mengadakan bimbingan keagamaan dan social kepada masyarakat;
 - d. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum

Berikut kami sajikan dalam tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tulangan :

Tabel 2. 3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Tulangan

No	Indikator	SPM/Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan			93,11	93,15	93,20	93,25	93,30	98,99	-	-	-	99,00	99,10	
2	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya Yang Didelegasikan ke Kecamatan TULANGAN Dilaksanakan Dengan Baik			100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	
3	Persentase Desa Maju di Kecamatan TULANGAN			N/A	31,8%	31,8%	31,8%	31,8%	31,8%	-	-	-	31,8%	31,8%	

2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo, RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 adalah tahapan pertama dalam rangka mewujudkan visi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015-2025.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 masih menunggu proses dengan pendekatan perencanaan pembangunan yaitu politik, teknokratik, partisipatif dan perencanaan yang disusun berdasarkan masukan-masukan dari atas – bawah serta bawah – atas (topdown – bottom up). Namun demikian tentunya masih terdapat berbagai hal yang masih perlu ditindaklanjuti, disamping adanya hal-hal baru yang berkembang selama periode berikutnya, untuk itulah Kecamatan Tulangan Tahun 2021-2026 menyusun Renstra untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah efektif, efisien sehingga mendorong terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Berikut tabel 2.5. Review terhadap rancangan awal RKPD :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)KECAMATAN TULANGAN KAB. SIDOARJO
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN TULANGAN														
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						5.672.090.466,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN						5.332.624.666,00							0,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	-	5.332.624.666,00						-	0,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	-	3.765.440.380,00						35 Orang/bulan	0,00	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	-		-	35 Orang/bulan	3.765.440.380,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	35 Orang/bulan	0,00	KECAMATAN TULANGAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	360.053.089,00						11 Paket	0,00	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	-		-	11 Paket	9.108.549,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	11 Paket	0,00	KECAMATAN TULANGAN
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	-		-	30 Paket	63.135.441,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	30 Paket	0,00	KECAMATAN TULANGAN
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	-		-	3 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Paket	0,00	KECAMATAN TULANGAN
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	-		-	2 Paket	79.300.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Paket	0,00	KECAMATAN TULANGAN
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	-		-	1 Paket	1.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Paket	0,00	KECAMATAN TULANGAN

	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	2 Dokumen	4.320.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Dokumen	0,00	KECAMATAN TULANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>	-		-	15 Paket	11.439.099,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	15 Paket	0,00	KECAMATAN TULANGAN
	7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	-		-	10 Laporan	71.250.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	10 Laporan	0,00	KECAMATAN TULANGAN
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	-		-	50 Laporan	120.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	50 Laporan	0,00	KECAMATAN TULANGAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	-	62.218.920,00						10 Unit	0,00	
	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	-		-	10 Unit	62.218.920,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	10 Unit	0,00	KECAMATAN TULANGAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	1.054.754.977,00						3 Laporan	0,00	
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	-		-	3 Laporan	184.877.777,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Laporan	0,00	KECAMATAN TULANGAN
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	-		-	12 Laporan	869.877.200,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	0,00	KECAMATAN TULANGAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	90.157.300,00						2 Unit	0,00	
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	-		-	2 Unit	50.157.300,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Unit	0,00	KECAMATAN TULANGAN
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	3 Unit	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Unit	0,00	KECAMATAN TULANGAN
--	--	--	--	---	--	---	--------	---------------	---	------------------------------	---	---	---	--------	------	--------------------

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel														
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>	-		-	10 Unit	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	10 Unit	0,00	KECAMATAN TULANGAN
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	-		-	1 Unit	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Unit	0,00	KECAMATAN TULANGAN
	7.01	KECAMATAN						339.465.800,00							0,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	-	-	148.075.000,00						-	0,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di TingkatKecamatan	-	-	-	-	-	51.787.500,00						24 Laporan	0,00	
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>	-		-	24 Laporan	51.787.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	24 Laporan	0,00	KECAMATAN TULANGAN
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	-	-	-	63.550.000,00						12 Laporan	0,00	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	-		-	12 Laporan	63.550.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	0,00	KECAMATAN TULANGAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	-	-	-	32.737.500,00						2 Dokumen	0,00	
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
			<i>Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan</i>	-		-	2 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Dokumen	0,00	KECAMATAN TULANGAN
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														

			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan</i>	-		-	2 Laporan	14.950.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Laporan	0,00	KECAMATAN TULANGAN
--	--	--	---	---	--	---	-----------	---------------	---	------------------------------------	---	---	---	-----------	------	--------------------

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	-		-	3 Laporan	17.787.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Laporan	0,00	KECAMATAN TULANGAN
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-		-	-	86.900.000,00						-	0,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-		-	-	55.962.500,00						2 Laporan	0,00	
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	-		-	2 Laporan	7.050.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Laporan	0,00	KECAMATAN TULANGAN
	7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	-		-	6 Laporan	48.912.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	6 Laporan	0,00	KECAMATAN TULANGAN
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-		-	-	30.937.500,00						2 Laporan	0,00	
	7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>	-		-	2 Laporan	30.937.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Laporan	0,00	KECAMATAN TULANGAN
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-		-	-	60.220.800,00						-	0,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-		-	-	60.220.800,00						75 Orang	0,00	
	7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	75 Orang	60.220.800,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	75 Orang	0,00	KECAMATAN TULANGAN
4.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-		-	-	44.270.000,00						-	0,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-		-	-	44.270.000,00						22 Dokumen	0,00	
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	22 Dokumen	19.620.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	22 Dokumen	0,00	KECAMATAN TULANGAN
	7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	-		-	22 Dokumen	24.650.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	22 Dokumen	0,00	KECAMATAN TULANGAN
	X	-						239.632.097,00							0,00	
	X.XX	-						239.632.097,00							0,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	-	239.632.097,00						-	0,00	
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	-	172.132.097,00						10 Unit	0,00	
	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	10 Unit	172.132.097,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	10 Unit	0,00	KECAMATAN TULANGAN

	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	67.500.000,00						30 Unit	0,00	
	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	30 Unit	67.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	30 Unit	0,00	KECAMATAN TULANGAN
	J U M L A H							5.911.722.563,00							0,00	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memnuhi standart penyelenggaraan *good governance* dan *excellence service*. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Tulangan dalam kurun waktu Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Kerja SKPD

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Sidoarjo khususnya misi ke 1 Kecamatan Tulangan telah ditetapkan tujuan sebagai berikut :

“Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan”

Dalam rangka mencapai tujuan ditetapkan sasaran yaitu meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan.

Misi ke 2 Kecamatan Tulangan telah ditetapkan tujuan sebagai berikut:

“Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan”

dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan;
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

3.3. Program dan Kegiatan

1. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi.

2. Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan.

Untuk lebih jelasnya mengenai Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 Kecamatan Tulangan dapat dilihat pada Tabel 2.6. sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Provinsi/Kabupaten/Kota : Provinsi Jawa Timur/Kabupaten Sidoarjo
Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Tulangan
lembar 1 dari 5

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kab. Sidoarjo
Tahun 2024

Unit Organisasi : Kecamatan
Tulangan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
					Kecamatan Tulangan								5.911.722.563,00					0,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN								5.672.090.466,00					0,00
7	01				KECAMATAN								5.332.624.666,00					0,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								5.332.624.666,00					0,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3.765.440.380,00					0,00
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													

						Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-) Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan Tingkat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase realisasi anggaran PD	- Kab. Sidoarjo, Tulangan, Kenongo	75 nilai 100 persen 100 persen 100 Persen 87 persen	35 Orang/bulan	80 %	3.765.440.380,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	0,00
--	--	--	--	--	--	--	---	----------------------------------	------------------------------------	---	----------------	------	------------------	-------------------------------	--	---	----------------	------

						kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretari atan												
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							360.053.089,00						0,00
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi													
					Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													

					Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-) Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan Tingkat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	- Kab. Sidoarjo, Tulangan, Kenongo	75 nilai 100 persen 100 persen 100 Persen 87 persen	11 Paket	93.40 Nilai	9.108.549,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	0,00
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	---	----------	-------------	--------------	-------------------------------	--	----------	------

						kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretari atan												
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													

						Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-) Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan Tingkat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	- Kab. Sidoarjo, Tulangan, Kenongo	75 nilai 100 persen 100 persen 100 Persen 87 persen	30 Paket	93.40 Nilai	63.135.441,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	0,00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	---	----------	----------------	---------------	-------------------------------	--	--	----------	------

						kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretari atan													
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

					Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-) Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan Tingkat	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	- Kab. Sidoarjo, Tulangan, Kenongo	75 nilai 100 persen 100 persen 100 Persen 87 persen	3 Paket	93.40 Nilai		0,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	0,00
--	--	--	--	--	--	---	--	------------------------------------	---	---------	-------------	--	------	-------------------------------	--	---	---------	------

						kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretari atan												
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													

					Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-) Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan Tingkat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	- Kab. Sidoarjo, Tulangan, Kenongo	75 nilai 100 persen 100 persen 100 Persen 87 persen	2 Paket	93.40 Nilai	79.300.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	0,00
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	---	---------	----------------	---------------	-------------------------------	--	---------	------

						kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretari atan												
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													

					Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-) Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan Tingkat	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	- Kab. Sidoarjo, Tulangan, Kenongo	75 nilai 100 persen 100 persen 100 Persen 87 persen	1 Paket	93.40 Nilai	1.500.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0,00
--	--	--	--	--	--	---	--	------------------------------------	---	---------	----------------	--------------	-------------------------------	---	---------	------

						kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretari atan													
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

					Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-) Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan Tingkat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	- Kab. Sidoarjo, Tulangan, Kenongo	75 nilai 100 persen 100 persen 100 Persen 87 persen	2 Dokumen	93.40 Nilai	4.320.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	0,00
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	---	-----------	-------------	--------------	-------------------------------	--	-----------	------

						kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretari atan												
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material													

					Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-) Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan Tingkat	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	- Kab. Sidoarjo, Tulangan, Kenongo	75 nilai 100 persen 100 persen 100 Persen 87 persen	15 Paket	93.40 Nilai	11.439.099,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan /Material yang Disediakan	15 Paket	0,00
--	--	--	--	--	--	---	--	------------------------------------	---	----------	----------------	---------------	-------------------------------	--	--	----------	------

						kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretari atan												
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu													

					Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-) Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan Tingkat	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	- Kab. Sidoarjo, Tulangan, Kenongo	75 nilai 100 persen 100 persen 100 Persen 87 persen	10 Laporan	93.40 Nilai	71.250.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	10 Laporan	0,00
--	--	--	--	--	--	---	--	------------------------------------	---	------------	-------------	---------------	-------------------------------	---	------------	------

						kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretari atan													
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

					Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-) Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan Tingkat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	- Kab. Sidoarjo, Tulangan, Kenongo	75 nilai 100 persen 100 persen 100 Persen 87 persen	50 Laporan	93.40 Nilai	120.000.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	0,00
--	--	--	--	--	--	---	--	------------------------------------	---	------------	-------------	----------------	-------------------------------	--	---	------------	------

						kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretari atan												
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							62.218.920,00						0,00
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel													

					Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-) Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan Tingkat	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah dan Jenis BMD yang diadakan	- Kab. Sidoarjo, Tulangan, Kenongo	75 nilai 100 persen 100 persen 100 Persen 87 persen	10 Unit	98 Unit	62.218.920,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	0,00
--	--	--	--	--	--	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---	---------	---------	---------------	-------------------------------	--	------------------------------------	---------	------

						kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretari atan												
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1.054.754.977,00						0,00
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

					Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-) Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan Tingkat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	- Kab. Sidoarjo, Tulangan, Kenongo	75 nilai 100 persen 100 persen 100 Persen 87 persen	3 Laporan	100 %	184.877.777,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	0,00
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	---	-----------	-------	----------------	-------------------------------	--	--	-----------	------

						kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretari atan													
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

					Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-) Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan Tingkat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	- Kab. Sidoarjo, Tulangan, Kenongo	75 nilai 100 persen 100 persen 100 Persen 87 persen	12 Laporan	100 %	869.877.200,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	---	------------	-------	----------------	-------------------------------	--	------------	------

						kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretari atan												
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							90.157.300,00						0,00
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													

					Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-) Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan Tingkat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	- Kab. Sidoarjo, Tulangan, Kenongo	75 nilai 100 persen 100 persen 100 Persen 87 persen	2 Unit	8 Jenis	50.157.300,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	0,00
--	--	--	--	--	--	--	---	------------------------------------	---	--------	---------	---------------	-------------------------------	--	--	--------	------

					kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretari atan													
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													

					Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-) Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan Tingkat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	- Kab. Sidoarjo, Tulangan, Semua Kel/Desa	75 nilai 100 persen 100 persen 100 Persen 87 persen	3 Unit	8 Jenis	10.000.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	0,00
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	--------	---------	---------------	-------------------------------	--	--	--------	------

						kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretari atan												
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel													

					Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-) Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan Tingkat	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	- Kab. Sidoarjo, Tulangan, Kenongo	75 nilai 100 persen 100 persen 100 Persen 87 persen	10 Unit	8 Jenis	10.000.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	0,00
--	--	--	--	--	--	------------------------------	---	------------------------------------	---	---------	---------	---------------	-------------------------------	--	------------------------------	---------	------

					kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretari atan													
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													

					Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-) Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan Tingkat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	- Kab. Sidoarjo, Tulangan, Kenongo	75 nilai 100 persen 100 persen 100 Persen 87 persen	1 Unit	8 Jenis	20.000.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	1 Unit	0,00
--	--	--	--	--	--	---	---	------------------------------------	---	--------	---------	---------------	-------------------------------	--	---	--------	------

					kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretari atan													
7	01				KECAMATAN							339.465.800,00						0,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							148.075.000,00						0,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							51.787.500,00						0,00
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait													

						Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat , dan PKL	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi i bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang diitindaklanjuti	- Kab. Sidoarjo, Tulangan, Kenongo	100 Persen	24 Laporan	100 %	51.787.500,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	24 Laporan	0,00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								63.550.000,00					0,00
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													

						Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat , dan PKL	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prosentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SP dan SOP	- Kab. Sidoarjo, Tulangan, Kenongo	100 Persen	12 Laporan	100 %	63.550.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	0,00
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								32.737.500,00					0,00
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha													
						Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat , dan PKL	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Persentase pelaksanaan urusan yang dilimpahkan kepada camat	- Kab. Sidoarjo, Tulangan, Kenongo	100 Persen	2 Dokumen	100 %	0,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	2 Dokumen	0,00

7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan													
						Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat , dan PKL	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Persentase pelaksanaan urusan yang dilimpahkan kepada camat	- Kab. Sidoarjo, Tulangan, Kenongo	100 Persen	2 Laporan	100 %	14.950.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan	0,00
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan													
						Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat , dan PKL	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase pelaksanaan urusan yang dilimpahkan kepada camat	- Kab. Sidoarjo, Tulangan, Kenongo	100 Persen	3 Laporan	100 %	17.787.500,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	0,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								86.900.000,00					0,00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								55.962.500,00					0,00
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													

						Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertibnumum	- Kab. Sidoarjo, Tulangan, Kenongo	100 Persen 100 Persen	2 Laporan	100 %	7.050.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	0,00
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat													

					Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum	- Kab. Sidoarjo, Tulangan, Kenongo	100 Persen 100 Persen	6 Laporan	100 %	48.912.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6 Laporan	0,00
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								30.937.500,00					0,00
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia													

						Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	Persentase temuan pelanggaran perda, perkara dan konflik yang ditangani	- Kab. Sidoarjo, Tulangan, Kenongo	100 Persen 100 Persen	2 Laporan	100 %	30.937.500,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Laporan	0,00
--	--	--	--	--	--	---	---	---	------------------------------------	--------------------------	-----------	-------	---------------	-------------------------------	--	---	-----------	------

																		Indone sia		
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							60.220.800,00								0,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							60.220.800,00								0,00
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia															

						Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Jumlah upacara hari besar nasional yang dilaksanakan	- Kab. Sidoarjo, Tulangan, Kenongo	100 Persen	75 Orang	2 Kali	60.220.800,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara	75 Orang	0,00
--	--	--	--	--	--	---	---	--	------------------------------------	------------	----------	--------	---------------	-------------------------------	--	---	----------	------

							Kesatuan Republik Indonesia									Republ ik Indone sia Tahun 1945, Pelest arian Bhinne ka Tungg al Ika serta Pemer tahana n dan Pemeli haraan Keutu han Negar a Kesatu an Republ ik Indone sia		
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							44.270.000,00						0,00

7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi							44.270.000,00					0,00	
					Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa													
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa													
						Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Prosentase desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	- Kab. Sidoarjo, Tulangan, Kenongo	100 Persen	22 Dokumen	100 %	19.620.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	22 Dokumen	0,00
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa													
						Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan sesuai dengan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Prosentase desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan	- Kab. Sidoarjo, Tulangan, Kenongo	100 Persen	22 Dokumen	100 %	24.650.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala	22 Dokumen	0,00

						ketentuan dan tepat waktu		sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu								Desa dan Perangkat Desa		
X					-							239.632.097,00						0,00
X	XX				-							239.632.097,00						0,00
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							239.632.097,00						0,00
X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							172.132.097,00						0,00
X	XX	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-) Tingkat kepuasan aparatur perangkat	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah dan Jenis BMD yang diadakan	- Kab. Sidoarjo, Tulangan, Kenongo	75 nilai 100 persen 100 persen 100 Persen 87 persen	10 Unit	98 Unit	172.132.097,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0,00

					daerah terhadap pelayanan kesekretari atan Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretari atan Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretari atan												
X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							67.500.000,00					0,00
X	XX	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												

					Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-) Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan Tingkat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	- Kab. Sidoarjo, Tulangan, Kenongo	75 nilai 100 persen 100 persen 100 Persen 87 persen	30 Unit	8 Jenis	67.500.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	0,00
--	--	--	--	--	--	--	---	------------------------------------	---	---------	---------	---------------	-------------------------------	--	--	---------	------

						kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretari atan												
TOTAL													5.911.722.563,00					0,00

BAB IV

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Oleh Karena adanya suatu hal, hingga dokumen ini dibuat belum ada verifikasi Rencana Kerja oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah. Maka Rencana Kerja Kecamatan Tulangan Tahun 2024 kurang lebih sama dengan RKPD hasil input di aplikasi SIPD dengan alamat sidoarjo.kab.sipd.go.id pada menu Rancangan Awal RKPD dengan Rincian Sebagai Berikut (terlampir) :

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025)								
	Program/ Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2		3	4		5	6	7		8	9		10	11
	KECAMATAN TULANGAN						13.724.172.894							15.782.798.828
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						5.482.239.912							6.304.575.899
	1.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					96.433.014							110.897.966
	1.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec Tulangan	Prosentae rekomendasi hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pembangunan dan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang perekonomian yang di tindaklanjuti	a. 100% b.100% c.100% d.100%	96.433.014		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec Tulangan	Prosentae rekomendasi hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pembangunan dan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang perekonomian yang di tindaklanjuti	a. 100% b.100% c.100% d.100%		0	
	1.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					129.817.426							149.290.040
	1.2.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Tulangan	Jumlah dokumen SKM yang disusun Jumlah peserta sosialisasi pelayanan umum Prosentase administrasi kependudukan yang diproses Prosentase pelayanan umum yang telah diselesaikan	1 Dok 60 Orang 100 % 100 %	129.817.426		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Tulangan	Jumlah dokumen SKM yang disusun Jumlah peserta sosialisasi pelayanan umum Prosentase administrasi kependudukan yang diproses Prosentase pelayanan umum yang telah diselesaikan	1 Dok 60 Orang 100 % 100 %		0	
	1.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					5.255.989.472							6.044.387.893

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan (Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025)				
	Program/ Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan	Kec Tulangan	Prosentasae permohonan IMB Rumah Tinggal 2 Lantai luasan Maksimal 400m2 yang telah diberi saran teknis Prosentase permohonan IMB Usaha Mkro yang telah diberi saran teknis Prosentase SIUP usaha mikro yang diterbitkan Posentase TDP usaha mikro yang diterbitkan	100% 100% 100%	27.246.176	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan	Kec Tulangan	Prosentasae permohonan IMB Rumah Tinggal 2 Lantai luasan Maksimal 400m2 yang telah diberi saran teknis Prosentase permohonan IMB Usaha Mkro yang telah diberi saran teknis Prosentase SIUP usaha mikro yang diterbitkan Posentase TDP usaha mikro yang diterbitkan	100% 100% 100%	0
	1.3.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Tulangan	Jumlah kader lingkungan hidup Prosentase desa yang telah mengikuti pembinaan tentang lingkungan hidupdan penanganan sampah domestic Prosentase pedagang kaki lima yang telah mengikuti pembinaan Prosentase usaha ekonomi masyarakat yang telah mengikuti pembinaan	44 Orang 100% 100% 100%	5.228.743.296	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Tulangan	Jumlah kader lingkungan hidup Prosentase desa yang telah mengikuti pembinaan tentang lingkungan hidupdan penanganan sampah domestic Prosentase pedagang kaki lima yang telah mengikuti pembinaan Prosentase usaha ekonomi masyarakat yang telah mengikuti pembinaan	44 Orang 100% 100% 100%	0
2	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					379.067.469					435.927.589
	2.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				350.696.955					403.301.498
	2.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertical di wilayah kecamatan	Kec Tulangan	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditinjaulanjuti	100%	202.366.352	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertical di wilayah kecamatan	Kec Tulangan	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditinjaulanjuti	100%	0

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025)					
	Program/ Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.1.2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec Tulangan	Prosentase lembaga sosial, agama, dan kemasyarakatan yang telah mengikuti pembinaan	100%	148.330.603	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec Tulangan	Prosentase lembaga sosial, agama, dan kemasyarakatan yang telah mengikuti pembinaan	100%	0
	2.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada				28.370.514					32.626.091
	2.2.1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perngkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec Tulangan	Prosentase temuan konflik social yang ditangani Prosentase temuan pelanggaran perda yang ditangani	100% 100%	28.370.514	Koordinasi/Sinergi Dengan Perngkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec Tulangan	Prosentase temuan konflik social yang ditangani Prosentase temuan pelanggaran perda yang ditangani	100% 100%	0
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					253.383.587					291.391.125
	3.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				253.383.587					291.391.125
	3.1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik	Kec Tulangan	Jumlah upacara hari besar nasional yang dilaksanakan	2 Upacara	253.383.587	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik	Kec Tulangan	Jumlah upacara hari besar nasional yang dilaksanakan	2 Upacara	291.391.125
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					37.410.588					43.022.176
	4.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				37.410.588					43.022.176
	4.1.1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec Tulangan	Prosentase APBDesa yang telah dilakukan evaluasi	100 %	27.843.750	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec Tulangan	Prosentase APBDesa yang telah dilakukan evaluasi	100 %	27.843.750
	4.1.2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kec Tulangan	Prosentase desa yang mempunyai SDM berkompeten dalam penyusunan perencanaan, penganggaran dan pelaporan Prosentase desa yang telah mengikuti pembinaan tentang perencanaan, penganggaran dan pelaporan	100 % 100 %	9.566.838	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kec Tulangan	Prosentase desa yang mempunyai SDM berkompeten dalam penyusunan perencanaan, penganggaran dan pelaporan Prosentase desa yang telah mengikuti pembinaan tentang perencanaan, penganggaran dan pelaporan	100 % 100 %	0
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					7.572.071.33 8					8.707.882.03 9
	5.1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				58.693.010					67.496.962
	5.1.1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kec Tulangan	Jumlah dokumen penganggaran yang di susun (RKA dan DPA) Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	4 Dokumen 1 Dokumen		Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kec Tulangan	Jumlah dokumen penganggaran yang di susun (RKA dan DPA) Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	4 Dokumen 1 Dokumen	
	5.1.2	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Kec Tulangan	Jumlah dokumen Monev PD yang disusun	4 Dokumen		Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Kec Tulangan	Jumlah dokumen Monev PD yang disusun	4 Dokumen	
	5.2	Administrasi Keuangan				5.451.777.983				Administrasi Keuangan	5.451.777.983

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025)					
	Program/ Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Tulangan	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	36 Orang	5.450.993.408	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Tulangan	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	36 Orang	5.450.993.408
	5.2.2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kec Tulangan	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	1 Laporan	784.575	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kec Tulangan	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	1 Laporan	784.575
	5.3	Administrasi Umum				2.001.006.64 3					2.301.157.639
	5.3.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec Tulangan	Jumlah surat keluar masuk yang di kelola	1500 Surat	600,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec Tulangan	Jumlah surat keluar masuk yang di kelola	1500 Surat	0
	5.3.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec Tulangan	Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	1 Tahun	164.200.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec Tulangan	Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	1 Tahun	0
	5.3.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kec Tulangan	JUmlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	12 Bulan	15.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kec Tulangan	JUmlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	12 Bulan	0
	5.3.4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kec Tulangan	Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar Jumlah tenaga non ASN yang terbayar	15 Orang 2 orang	225.049.600	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kec Tulangan	Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar Jumlah tenaga non ASN yang terbayar	15 Orang 2 orang	0
	5.3.5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kec Tulangan	Jumlah Penjaga Kantor Yang Terbayar Jumlah tenaga kebersihan yang terbayar	2 Orang 2 Orang	142.707.200	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kec Tulangan	Jumlah Penjaga Kantor Yang Terbayar Jumlah tenaga kebersihan yang terbayar	2 Orang 2 Orang	0
	5.3.6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kec Tulangan	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	35 Jenis	64.937.598	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kec Tulangan	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	35 Jenis	0
	5.3.7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec Tulangan	Jumlah cetak penggandaan yang tersedia	6 Jenis	8.231.071	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec Tulangan	Jumlah cetak penggandaan yang tersedia	6 Jenis	0
	5.3.8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec Tulangan	Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia	15 Komponen	24.993.438	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec Tulangan	Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia	15 Komponen	0
	5.3.9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec Tulangan	Jumlah peralatan yang tersedia	5 Buah	32.034.269	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec Tulangan	Jumlah peralatan yang tersedia	5 Buah	0
	5.3.10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan	Kec Tulangan	Jumlah buku bahan bacaan dan koran yang tersedia	4 Buah	6.240.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan	Kec Tulangan	Jumlah buku bahan bacaan dan koran yang tersedia	4 Buah	0
	5.3.11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec Tulangan	Jumlah BBM yang disediakan	1 Tahun	60.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec Tulangan	Jumlah BBM yang disediakan	1 Tahun	0
	5.3.12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kec Tulangan	Jumlah jamuan rapat / tamu yang disediakan	1 Tahun	45.434.400	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kec Tulangan	Jumlah jamuan rapat / tamu yang disediakan	1 Tahun	0
	5.3.13	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kec Tulangan	Persentase surat tugas yang ditindak lanjuti	100 %	130.000.000	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kec Tulangan	Persentase surat tugas yang ditindak lanjuti	100 %	0
	5.3.14	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kec Tulangan	Jumlah peralatan gedung / kantor yang di adakan	37 Unit	742.488.347	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kec Tulangan	Jumlah peralatan gedung / kantor yang di adakan	37 Unit	0
	5.3.15	Pengadaan Mebeleur	Kec Tulangan	Jumlah mebeleur yang diadakan	10 Unit	31.608.062	Pengadaan Mebeleur	Kec Tulangan	Jumlah mebeleur yang diadakan	10 Unit	0

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025)						
	Program/ Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10	11
	5.3.16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kec Tulangan	Jumlah bahan baku bangunan yang tersedia Jumlah luas gedung/kantor yang dipelihara Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang tersedia Jumlah tanaman yang disediakan	1500 M2 20 Buah 15 Buah	152.763.995		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kec Tulangan	Jumlah bahan baku bangunan yang tersedia Jumlah luas gedung/kantor yang dipelihara Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang tersedia Jumlah tanaman yang disediakan	1500 M2 20 Buah 15 Buah	0
	5.3.17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Kec Tulangan	Jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara	2 mobil	33.000.000		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Kec Tulangan	Jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara	2 mobil	0
	5.3.18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kec Tulangan	Jumlah bahan peralatan dan bahan pembersih kendaraan yang tersedia Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dipelihara	4 Buah 2 mobil	34.818.663		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kec Tulangan	Jumlah bahan peralatan dan bahan pembersih kendaraan yang tersedia Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dipelihara	4 Buah 2 mobil	0
	5.3.19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kec Tulangan	Jumlah jaringan listrik, telepon dan air yang di pelihara Jumlah perlengkapan gedung/kantor yang dipelihara	2 Jaringan 5 Buah	16.500.000		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kec Tulangan	Jumlah jaringan listrik, telepon dan air yang di pelihara Jumlah perlengkapan gedung/kantor yang dipelihara	2 Jaringan 5 Buah	0
	5.3.20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kec Tulangan	Jumlah jaringan komputer yang dipelihara jumlah jaringan wifi/LAN Jumlah peralatan gedung/kantor yang dipelihara	1 Jaringan 4 unit	70.400.000		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kec Tulangan	Jumlah jaringan komputer yang dipelihara jumlah jaringan wifi/LAN Jumlah peralatan gedung/kantor yang dipelihara	1 Jaringan 4 unit	0
	5.4	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				60.593.702						69.682.757
	5.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapanny	Kec Tulangan	Jumlah pakaian dinas harian (PDH) yang diadakan	36 Stel	29.981.259		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapanny	Kec Tulangan	Jumlah pakaian dinas harian (PDH) yang diadakan	36 Stel	0
	5.4.2	Pengadaan Pakaian Korpri	Kec Tulangan	Jumlah pakaian korpri yang diadakan	36 Stel	15.779.610		Pengadaan Pakaian Korpri	Kec Tulangan	Jumlah pakaian korpri yang diadakan	36 Stel	0
	5.4.3	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Kec Tulangan	Jumlah pakaian khusus hari hari tertentu yang diadakan	36 Stel	14.832.833		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Kec Tulangan	Jumlah pakaian khusus hari hari tertentu yang diadakan	36 Stel	0

BAB V

Penutup

Rencana kerja merupakan tolak ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja akan mengilhami tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Tulangan di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan. Kecamatan Tulangan sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan tahun 2024. Rencana Kerja Kecamatan Tulangan yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan, kepala seksi dan seluruh staf tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dengan disusunnya Rencana Kerja ini, Kecamatan Tulangan telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan dengan terencana dan terkoordinasi, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada tahun 2024, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Tulangan, 8 Januari 2024

CAMAT TULANGAN



SUPRAYITNO, S.STP., M.HP

Pembina Tingkat I

NIP. 197901011998101001